



Leverage dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah: Bukti Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Rimma Amanda Fauza¹, Faisal², Mariana³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: rimaamandafauza18@gmail.com¹, faisal_pnl@pnl.ac.id², mariana@pnl.ac.id³

Article Info

Article history:

Received August 31, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 05, 2026

Keywords:

Leverage; Debt to Asset Ratio (DAR); Debt to Equity Ratio (DER); Local Government Financial Performance; Fiscal Decentralization Degree (FDD)

ABSTRACT

This study examines the relationship between leverage, proxied by the Debt to Asset Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER), and the financial performance of regency and municipal governments in North Sumatra Province, measured by the Fiscal Decentralization Degree (FDD). A quantitative design used audited Local Government Financial Statements and fiscal data for all 33 regencies/municipalities during 2017-2022, yielding a balanced panel of 198 local-government-year observations. The reported model was estimated with pooled multiple linear regression in IBM SPSS Statistics 27. The estimates indicate positive and statistically significant associations of DAR ($B = 0.919$; $t = 13.022$; $p < 0.001$) and DER ($B = 0.669$; $t = 9.485$; $p < 0.001$) with FDD. Jointly, the two indicators are significant ($F = 230.709$; $p < 0.001$) and explain 70.3% of the observed variation in FDD. These findings show that leverage and local fiscal capacity move together, but they do not establish that additional debt causes higher fiscal independence. The pooled observational design, the shared accounting basis of DAR and DER, and the absence of region and year effects require cautious interpretation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 31, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 05, 2026

Kata Kunci:

Leverage; Debt to Asset Ratio (DAR); Debt to Equity Ratio (DER); Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang diukur menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Penelitian kuantitatif ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit serta data fiskal seluruh 33 kabupaten/kota selama 2017-2022, sehingga membentuk panel seimbang sebanyak 198 observasi pemerintah-daerah-tahun. Model yang dilaporkan diestimasi dengan regresi linier berganda pooled menggunakan IBM SPSS Statistics 27. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAR berasosiasi positif dan signifikan dengan DDF ($B = 0,919$; $t = 13,022$; $p < 0,001$), demikian pula DER ($B = 0,669$; $t = 9,485$; $p < 0,001$). Secara bersama-sama, kedua indikator signifikan ($F = 230,709$; $p < 0,001$) dan menjelaskan 70,3% variasi



DDF. Temuan ini menunjukkan bahwa leverage dan kapasitas fiskal daerah bergerak bersama, tetapi tidak membuktikan bahwa tambahan utang menyebabkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Desain observasional pooled, dasar akuntansi DAR dan DER yang saling berkaitan, serta belum dimasukkannya efek kabupaten/kota dan tahun menuntut interpretasi yang hati-hati. Penelitian lanjutan perlu mengestimasi model panel terpisah dengan galat baku robust dan variabel kontrol fiskal yang relevan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rimma Amanda Fauza

Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: rimaamandafauza18@gmail.com

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah mengelola sumber daya fiskal untuk membiayai layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi, kinerja tersebut tidak hanya tercermin dari kepatuhan pelaporan, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yaitu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, karena itu digunakan untuk menggambarkan kapasitas dan kemandirian fiskal. Secara teoritis, desentralisasi dapat mendekatkan keputusan anggaran kepada kebutuhan warga, tetapi hasilnya bergantung pada desain kewenangan, insentif, dan akuntabilitas (Oates, 1999; de Mello, 2000; Weingast, 2009; Faguet, 2014; Martinez-Vazquez et al., 2017).

Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa transfer antarpemerintahan tetap menjadi bagian dominan dari pendapatan banyak daerah. Lewis dan Smoke (2017) menemukan bahwa respons pemerintah daerah terhadap transfer tidak selalu searah dan perlu diuji secara empiris. Lewis (2017) juga menunjukkan bahwa tambahan belanja tidak otomatis meningkatkan layanan ketika tata kelola dan ketergantungan transfer lemah. Reformasi melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memperbarui arsitektur transfer, pajak daerah, dan kontrol pusat, namun tantangan mobilisasi PAD dan efisiensi belanja tetap relevan (Lewis, 2023).

Salah satu karakteristik keuangan yang diduga berkaitan dengan DDF adalah leverage. DAR menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh kewajiban, sedangkan DER membandingkan kewajiban dengan ekuitas. Selain struktur kewajiban, belanja modal dan penerapan basis akrual turut berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al., 2023). Pada pemerintah daerah, leverage memiliki dua kemungkinan mekanisme. Pembiayaan yang terarah pada aset produktif dapat memperluas ruang fiskal dan basis layanan, tetapi kewajiban tetap juga dapat menekan anggaran, memunculkan soft budget constraint, dan menurunkan fleksibilitas fiskal. Literatur internasional karena itu menemukan



hubungan yang bergantung pada institusi, disiplin anggaran, ketimpangan fiskal vertikal, dan otonomi pajak (Rodden, 2002; Baskaran, 2010; Neyapti, 2010; Eyraud & Lusinyan, 2013; Foremny, 2014).

Keandalan pengukuran juga ditentukan oleh kualitas pelaporan dan pengawasan. Reformasi akuntansi sektor publik menuntut konsistensi pengakuan kewajiban dan aset agar rasio yang dihasilkan dapat dibandingkan (Mariana et al., 2025). Kualitas pengungkapan laporan keuangan berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah (Arifai et al., 2026). Pemanfaatan SIKD mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui dokumentasi, pengelolaan, serta pelaporan data keuangan yang lebih terstruktur (Maulidi et al., 2025). Literatur pengungkapan keberlanjutan sektor publik juga menekankan konsistensi standar dan keterbandingan informasi untuk memperkuat akuntabilitas (Arifai et al., 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan LKPD yang telah diaudit dan data DJPK sebagai dasar verifikasi.

Temuan domestik masih beragam. Alfi dan Sari (2023) melaporkan hubungan positif leverage dengan kinerja keuangan dan Banunaek et al. (2022) menempatkannya sebagai salah satu determinan yang perlu diuji, sedangkan Putri dan Priyadi (2021) serta Sedek dan Kusumawati (2024) tidak menemukan pengaruh leverage. Perbedaan wilayah, periode, proksi kinerja, dan spesifikasi model membuka ruang pengujian lebih lanjut. Penelitian ini menguji hubungan DAR dan DER, baik secara parsial maupun simultan, dengan DDF pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama 2017-2022. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa DAR dan DER masing-masing serta secara simultan berhubungan dengan DDF.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan unit analisis pemerintah-daerah-tahun. Populasi mencakup seluruh 33 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Setelah pemeriksaan kelengkapan data, seluruh unit memiliki data untuk enam tahun pengamatan, 2017-2022, sehingga digunakan teknik sensus dan diperoleh panel seimbang sebanyak 198 observasi.

Data sekunder bersumber dari LKPD yang telah diaudit BPK RI, portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta laman resmi pemerintah daerah untuk verifikasi silang. Variabel independen adalah DAR (X1) dan DER (X2), sedangkan variabel dependen adalah DDF (Y). Rumus dan skala setiap variabel disajikan pada Tabel 1. Seluruh angka dianalisis pada skala yang konsisten dengan dataset sumber.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
DAR (X1)	Proporsi aset yang dibiayai kewajiban	Total kewajiban / total aset	Rasio
DER (X2)	Perbandingan kewajiban dengan ekuitas	Total kewajiban / ekuitas	Rasio
DDF (Y)	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan	PAD / total pendapatan daerah	Rasio

Sumber: Data diolah, 2026



Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linier berganda pooled menggunakan IBM SPSS Statistics 27 pada tingkat signifikansi 5%. Pemeriksaan model meliputi normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nilai keluaran SPSS Sig. 0,000 dilaporkan sebagai $p < 0,001$. Model empiris adalah $DDFit = \alpha + \beta_1 DARit + \beta_2 DERit + \epsilon_{it}$. Karena observasi daerah berulang lintas waktu, koefisien ditafsirkan sebagai asosiasi statistik, bukan bukti kausal. Keterkaitan basis akuntansi DAR dan DER juga menuntut kehati-hatian dalam membaca kontribusi parsial masing-masing rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Statistik Deskriptif

Objek penelitian mencakup 33 kabupaten/kota selama enam tahun. DDF digunakan sebagai proksi kinerja karena menunjukkan besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Statistik deskriptif pada Tabel 2 memperlihatkan variasi antarwilayah dan antartahun pada ketiga rasio.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan Baku
DAR	198	0,140	2,060	0,97424	0,383663
DER	198	0,110	2,190	1,01606	0,384059
DDF	198	0,730	4,030	2,08808	0,620871

Sumber: Data diolah, 2026

DAR memiliki rata-rata 0,97424 dengan rentang 0,140-2,060; DER memiliki rata-rata 1,01606 dengan rentang 0,110-2,190; sedangkan DDF memiliki rata-rata 2,08808 dengan rentang 0,730-4,030. Penyebaran DDF yang lebih besar dibandingkan kedua rasio leverage menunjukkan heterogenitas kapasitas fiskal di antara pemerintah daerah yang diamati.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Koefisien Regresi

Model	B	Std. Error	Beta	t	p
Konstanta	0,513	0,078	-	6,602	< 0,001
DAR	0,919	0,071	0,568	13,022	< 0,001
DER	0,669	0,070	0,414	9,485	< 0,001

Sumber: Data diolah, 2026

Persamaan estimasi adalah $DDF = 0,513 + 0,919 DAR + 0,669 DER$. Dengan variabel lain dipertahankan konstan, kenaikan satu unit DAR pada skala analisis berasosiasi dengan kenaikan DDF sebesar 0,919 unit, sedangkan kenaikan satu unit DER berasosiasi dengan kenaikan DDF sebesar 0,669 unit. Kedua koefisien memiliki $p < 0,001$. Interpretasi ini bersifat kondisional dalam model dan tidak otomatis berarti peningkatan utang menyebabkan kenaikan PAD.

**Tabel 4. Ringkasan dan Uji Kelayakan Model**

R	R Square	Adjusted R Square	F	p
0,838	0,703	0,700	230,709	< 0,001

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai R sebesar 0,838 menunjukkan hubungan gabungan yang kuat. R Square 0,703 berarti 70,3% variasi DDF dalam sampel dijelaskan oleh DAR dan DER pada spesifikasi pooled yang digunakan, sedangkan 29,7% berkaitan dengan faktor lain dan galat. Uji F menghasilkan 230,709 dengan $p < 0,001$, sehingga kedua prediktor secara bersama-sama signifikan. Besarnya R^2 perlu dibaca bersama potensi tumpang tindih informasi antara DAR dan DER.

Pengaruh DAR terhadap Kinerja Keuangan

DAR memiliki $B = 0,919$, $t = 13,022$, dan $p < 0,001$. Hasil ini mendukung hubungan positif DAR dengan DDF. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa kewajiban yang terkait dengan pembentukan aset produktif berjalan bersama peningkatan basis pelayanan dan aktivitas ekonomi yang kemudian memperkuat PAD. Penjelasan tersebut tetap bersyarat: jenis kewajiban, kualitas aset, tenor, biaya layanan utang, dan tata kelola menentukan apakah ruang fiskal benar-benar bertambah.

Temuan ini searah dengan Alfi dan Sari (2023), tetapi berbeda dengan Putri dan Priyadi (2021) serta Sedek dan Kusumawati (2024) yang tidak menemukan pengaruh leverage. Literatur internasional juga tidak memberi prediksi tunggal. Baskaran (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat membatasi maupun mendorong utang, sedangkan Neyapti (2010) menekankan peran kualitas tata kelola dan disiplin fiskal. Karena itu, koefisien positif dalam sampel Sumatera Utara lebih tepat dibaca sebagai hubungan kontekstual daripada rekomendasi umum untuk menambah utang.

Pengaruh DER terhadap Kinerja Keuangan

DER memiliki $B = 0,669$, $t = 9,485$, dan $p < 0,001$, sehingga berasosiasi positif dengan DDF setelah DAR dikendalikan. Rasio ini menggambarkan tekanan kewajiban relatif terhadap posisi ekuitas. Hubungan positif dapat muncul ketika pemerintah dengan kapasitas fiskal dan aset yang lebih besar juga memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Namun, DER yang tinggi tetap meningkatkan eksposur terhadap kewajiban dan tidak dapat dinilai baik tanpa informasi tujuan pembiayaan, arus kas, serta kemampuan membayar.

Pengaruh DAR dan DER secara Simultan

Secara simultan, DAR dan DER signifikan terhadap DDF. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa struktur pembiayaan berkaitan dengan kapasitas fiskal, tetapi hubungan tersebut dipengaruhi desain transfer, otonomi pajak, dan aturan fiskal. Rodden (2002) menunjukkan risiko soft budget constraint ketika tanggung jawab belanja dan pendapatan tidak selaras, sedangkan Foremny (2014) menemukan bahwa otonomi pajak dan aturan fiskal membentuk disiplin defisit subnasional. Dalam konteks Indonesia, insentif transfer juga menghasilkan respons yang beragam (Lewis & Smoke, 2017). Liza dan Mariana (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan budget ratcheting



memengaruhi belanja modal serta bahwa budget ratcheting memoderasi hubungan tersebut. Arifai et al. (2026) selanjutnya menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan berhubungan dengan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, sehingga DDF perlu dibaca bersama dimensi tata kelola dan kesinambungan fiskal. Implikasi kebijakannya bukan mendorong utang, melainkan memastikan pembiayaan diarahkan ke aset bernilai publik, disertai batas risiko, audit, dan strategi peningkatan PAD.

Keterbatasan Penelitian

Pertama, regresi pooled belum mengendalikan karakteristik tetap kabupaten/kota, guncangan tahun, ketergantungan transfer, ukuran daerah, belanja modal, maupun kualitas audit; endogenitas dan kausalitas terbalik masih mungkin terjadi. Kedua, DAR dan DER menggunakan pembilang yang sama dan penyebut yang terhubung melalui identitas akuntansi, sehingga potensi multikolinearitas harus dinilai dengan VIF, tolerance, dan condition index. Ketiga, DDF hanya menangkap kontribusi PAD, bukan efisiensi belanja, solvabilitas, atau mutu layanan. Keempat, periode 2017-2022 mencakup guncangan pandemi. Penelitian lanjutan perlu menggunakan fixed effects atau random effects yang dipilih secara teruji, galat baku terklaster, model DAR dan DER terpisah, serta uji sensitivitas dengan indikator kinerja yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan keluaran regresi yang dilaporkan, DAR dan DER masing-masing berasosiasi positif dan signifikan dengan DDF pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama 2017-2022. Secara bersama-sama, keduanya signifikan dan menjelaskan 70,3% variasi DDF pada model pooled. Hasil ini menunjukkan keterkaitan antara struktur kewajiban dan kapasitas fiskal, tetapi tidak membuktikan bahwa penambahan utang meningkatkan kemandirian daerah. Kebijakan pembiayaan perlu menekankan kelayakan proyek, kemampuan membayar, transparansi, pengawasan BPK, dan penguatan PAD. Kesimpulan kausal memerlukan estimasi panel dan pengujian robustness yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh leverage, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098-1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Arifai, M., Mariana, M., Fahlevi, H., Indriani, M., & Darwanis, D. (2025). Structured literature analysis on sustainability report disclosure in public sector organizations. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 483-501. https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.2025.v15i2.009
- Arifai, M., Mariana, M., Kamaliah, N., Rahmati, R., & Jannah, M. (2026). Pengaruh ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 9(1), 66-69.



- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49-59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>
- Baskaran, T. (2010). On the link between fiscal decentralization and public debt in OECD countries. *Public Choice*, 145, 351-378. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9570-4>
- de Mello, L. R. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: A cross-country analysis. *World Development*, 28(2), 365-380. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0)
- Eyraud, L., & Lusinyan, L. (2013). Vertical fiscal imbalances and fiscal performance in advanced economies. *Journal of Monetary Economics*, 60(5), 571-587. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.04.012>
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2-13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Foremny, D. (2014). Sub-national deficits in European countries: The impact of fiscal rules and tax autonomy. *European Journal of Political Economy*, 34, 86-110. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.01.003>
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695-1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1-28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111-139. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>
- Liza, L., & Mariana, M. (2023). Can budget ratcheting moderate the relationship between financial performance and capital expenditures? *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(3), 5472-5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>
- Mariana, M., Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). Public sector accounting reform: A systematic literature review. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 132-141. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.320>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Maulidi, M. R., Safira, Z., Nabila, J., Mariana, M., & Rahmati, R. (2025). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the regional financial information system (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 54-66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Neyapti, B. (2010). Fiscal decentralization and deficits: International evidence. *European Journal of Political Economy*, 26(2), 155-166. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.01.001>
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>



- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1-16.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rodden, J. (2002). The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, 46(3), 670-687. <https://doi.org/10.2307/3088407>
- Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 9081-9100.
- Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279-293. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>